

ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO

Yulita Zanaria¹⁾, Aris Sunyoto²⁾

Universitas Muhammadiyah Metro

Jalan Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo Kec.Metro Timur,Metro Lampung 34111

Email: yualitakenanga@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro dalam pengelolaan aset daerah. Sebagai Bendahara Umum Daerah, maka BKAD merupakan dinas teknis yang bertanggung jawab dalam menerima pendapatan daerah dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan daerah melalui kas umum daerah. Dengan adanya kas daerah maka suatu daerah dapat mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah. Di dalam kas umum daerah juga dapat diketahui berapakah kekayaan yang dimiliki suatu daerah. Kas daerah sendiri termuat dalam neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan. Hasil penelitian dalam penegelolaan kas selama ini telah menerima pendapatan daerah dan melakukan pencairan dana yang digunakan untuk keperluan belanja daerah. Prosedur penerimaan kas dan pencairan dana yang langsung ditangani oleh seksi pengelolaan kas daerah diatur dalam pedoman penata usahaan pelaksanaan APND Kota Metro dan sejauh ini seksi pengelolaan kas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman tersebut. Secara umum kinerja BPKAD Kota Metro dalam pengelolaan aset lancar beum dappat dikatakan baik dan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja BPKAD dalam pengelolaan aset lancar yaitu akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang perlu adanya pembenahan agar pendapatan daerah yang masuk ke kas daerah menjadi meningkat.

Kata Kunci : Kinerja

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the performance of the Metro City Asset Financial Management Agency (BPKAD) in managing regional assets. As the Regional General Treasurer, BKAD is a technical service that is responsible for receiving regional income and issuing money for regional needs through regional general cash. With the regional treasury, a region can manage the availability of sufficient funds to finance regional expenditures. In the regional general cash, it can also be seen how much wealth a region has. Regional cash itself is contained in the comparative balance sheet which is part of the financial statements. The results of the research in cash management have received regional income and disbursed funds used for regional expenditure purposes. The procedure for cash receipts and disbursement of funds directly handled by the regional cash management section is regulated in the guidelines for managing the business implementation of the Metro City APND and so far the cash management section has carried out its duties in accordance with these guidelines. In general, Metro City BPKAD's performance in managing lancer beum assets is said to be good and still not optimal, this can be seen based on indicators used in BPKAD's performance appraisal in managing transparent assets, namely accountability, transparency, economy, efficiency and effectiveness. regional income that goes into regional treasury has increased.

Keywords - Performance

1. PENDAHULUAN

Era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998. Salah satu bentuk reformasi yang terjadi di Indonesia adalah reformasi pemerintah yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indra Bastian 2006:338). Dari pengertian otonomi daerah tersebut, dapat dipahami bahwa daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat.

Pemberlakuan otonomi daerah dimulai pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". (Mardiasmo, 2002:4-5). Tap MPR ini merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan langkah awal pelaksanaan otonomi daerah. Mardiasmo menjelaskan bahwa dalam undang-undang No.22 tahun 1999 disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (2002:102).

Sejalan dengan perkembangan tata pemerintahan baru di Indonesia, maka pada tahun 2004 dikeluarkan undang-undang RI nomor 32 tahun 2004. Dikeluarkannya UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU RI nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan yang menonjol adalah perubahan perubahan dalam pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diatur dalam PP No. 58 tahun 2005. Pemerintah daerah dituntut kemandiriannya untuk mengurus pembiayaan kebutuhan rumah tangganya. Salah satu yang

dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu kabupaten menjadi tugas utama dari Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD merupakan satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya (Nurlan Darise, 2008:20). Kekayaan daerah dapat juga disebut dengan aset daerah. Kekayaan atau aset daerah secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset keuangan (*current assets*) dan aset non keuangan (*non-current assets*). Aset keuangan merupakan segala bentuk kekayaan pemerintah yang berupa kas dan aset lainnya yang dapat diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset non keuangan berwujud berupa aset persediaan dan aset tetap. Aset tetap sendiri biasanya lebih dikenal sebagai barang milik daerah atau Negara.

Dalam PP No 25 tahun 2005 disebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah di kabupaten kota Metro menjadi tanggung jawab dari dinas pendapata, pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang pendapata, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan seluruh keuangan dan aset dalam suatu daerah yang nantinya dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. BPKAD merupakan pejabat pengelola keuangan daerah yang juga bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Sebagai bendahara umum daerah, maka BPKAD merupakan dinas teknis yang bertanggung jawab dalam menerima pendapatan daerah dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan daerah melalui kas umum daerah. Dengan adanya kas daerah maka suatu daerah mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah. Di dalam kas umum daerah juga dapat diketahui berapakah kekayaan yang dimiliki suatu daerah. Kas daerah sendiri termuat dalam neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan.

Dari paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah kinerja badan pengelolaan, keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah yang dikhususkan dalam pengelolaan aset lancar. Di dalam aset lancar terbagi menjadi kas daerah, piutang daerah, investasi jangka pendek dan persediaan. Di dalam PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa pengelolaan kas daerah, piutang daerah, investasi jangka panjang dan persediaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metodologi Kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini merupakan objek yang menjadi focus penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang berlokasi di Kota Metro. Data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara kualitatif. Mengumpulkan informasi-informasi atau data-data melalui observasi dan wawancara sedangkan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan ialah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan studi literature. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui atau studi pustaka dari berbagai arsip penelitian, dalam bentuk dokumentasi atau basan-basan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data Metode penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah mengambil sampel dengan cara menentukan key informant atau informasi kunci yang dipandang paling tepat sebagai sumber data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam teknik ini untuk memperoleh data yang mendalam diperlukan informan yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan cara menunjuk seorang informan kemudian informan yang terpilih dapat menunjuk informan yang lebih tau, sehingga akan didapat data yang lebih lengkap. Pengembangan validitas data dapat digunakan dengan pemilihan teknik triangulasi. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Cara ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Dalam triangulasi data peneliti menggunakan beberapa data yang berbeda untuk

mengumpulkan data yang sama.

Di dalam analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote.

b. Sajian Data

Penyajian data dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis

c. Penarik Simpulan dan Verifikasi Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data kemudian ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Akuntabilitas

a. Pengelolaan Kas

Kas di Kabupaten Kota Metro pada akhir tahun anggaran berada di kas daerah, kas dibendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di puskesmas dimana kas yang berada pada puskesmas merupakan dana askeskin. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab seksi pengelolaan kas daerah BPKAD. kas yang berada pada bendahara penerimaan dan pengeluaran merupakan kas yang berada pada bendahara penerimaan maupun pengeluaran masing-masing SKPD. Kas yang berada di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai yang berada dibawah tanggungjawab bendahara penerimaan. sedangkan kas yang berada pada bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

Seksi pengelolaan kas daerah mengkompilasi atau menerima seluruh pendapatan yang diperoleh oleh Kota Metro dan kemudian dicatat sebagai penerimaan dalam buku harian kas dan disimpan di rekening bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rekening tersebut disimpan kekayaan Kota Metro yang berbentuk uang tunai maupun surat berharga. Melalui rekening umum kas daerah dapat diketahui seluruh kekayaan yang berupa aset lancar Kota Metro. Selain menerima dan mencatat seluruh pendapatan yang masuk, seksi pengelolaan kas daerah juga melakukan pengelolaan keuangan yang lain yaitu yang termasuk pencairan dana dan pengelolaan kas yang beum dipakai.

Seksi pengelolaan kas daerah bertugas untuk pencairan dana. Pencairan dana dilakukan berdasarkan DPA-SKPD (Dokumen Penerimaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan usulan dari anggaran kas di SKPD yang sudah disetujui ketika penyusunan anggaran. Pencairan dana dapat dilakukan dengan adanya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

b. Pengelolaan Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah Kota Metro untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak yang dilaksanakan Kota Metro. Piutan di lingkup Pemerintah Kota Metro terdiri dari piutang pajak dan retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, piutang pinjaman yang diberikan Kota Metro kepada BUMN/D, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi (TGR). Dalam pengelolaan piutang, BPKAD memiliki fungsi kompilasi dan koordinasi. Fungsi kompilasi yaitu BPKAD mencatat seluruh piutang yang dimiliki oleh SKPD sedangkan fungsi koordinasi yaitu BPKAD mengkoordinasikan dengan SKPD tentang penagihan piutang.

c. Pengelolaan Persediaan

Persediaan di Kota Metro belum ada mekanisme khusus yang mengatur sehingga inventarisasi persediaan hanya dilakukan setiap akhir tahun, persediaan di kota metro langsung ditangani oleh SKPD-SKPD. Masing-masing SKPD setiap akhir tahun menginventarisasi persediaan milik mereka dan kemudian dilaporkan ke BPKAD. BPKAD menerima laporan tersebut dan mengkompilasikannya menjadi laporan akhir tahun. Karena belum ada mekanisme khusus yang mengatur tentang persediaan, maka

persediaan hanya sebatas pada inventarisasi.

d. Pelaksanaan Tupoksi di BPKAD Kota Metro

BPKAD dalam pengelolaan aset lancar telah melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan TUPOKSI yang dimilikinya. Dalam pengelolaan kas daerah pada khususnya dan aset lancar pada umumnya yang dilaksanakan oleh BPKAD selalu mengacu pada peraturan yang ada, seperti peraturan bupati, pedoman penatausahaan dan pedoman system dan prosedur. Tupoksi BPKAD dalam pengelolaan aset lancar diatur dalam Perda No.3 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

e. Pertanggungjawaban BPKAD Kepada Masyarakat

Pertanggungjawaban BPKAD dalam pengelolaan aset lancar adalah dengan membuat laporan. Laporan tersebut berupa neraca komparatif yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah Kota Metro. Laporan tersebut merupakan kompilasi keseluruhan aset lancar pada akhir tahun. Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh BPKAD dalam pengelolaan aset lancar adalah pertanggungjawaban BPKAD kepada Bupati dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca komparatif, laporan arus kas. Aset lancar termuat didalam neraca komparatif. Alur dalam pertanggungjawaban adalah BPKAD bertanggungjawab kepada Bupati dan kemudian laporan keuangan tersebut di audit oleh BPK. Setelah diaudit oleh BPK kemudian dilaporkan ke DPRD dan setelah diterima oleh DPRD maka laporan keuangan tersebut diperdakan

Indikator Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan aset lancar, dapat dilihat dari keterbukaan BPKAD dalam menyediakan informasi kepada masyarakat tentang aset lancar baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat. Informasi tentang aset lancar yang disediakan oleh BPKAD adalah melalui neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan Pemerintah Kota Metro. Penyampaian informasi disampaikan melalui media massa lebih spesifiknya melalui media internet yaitu melalui website Pemerintah Kota Metro dan juga melalui surat kabar.

Transparansi melalui website belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini

disebabkan keadaan masyarakat yang masih tradisional dan rata-rata tinggal di pedesaan. Website kota Metro juga tidak selalu mudah diakses bahkan juga dikarenakan website yang tidak diurus sehingga informasinya jarang diperbaharui dan kadang susah diakses. Aset lancar pada surat kabar juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan informasi tentang aset lancar. Informasi yang hanya disampaikan sebulan sekali belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat tentang aset lancar. Bahkan kesan yang terlihat informasi yang disampaikan melalui website maupun surat kabar hanya formalitas dan sekedar menggugurkan kewajiban dalam hal transparansi. Keterbukaan informasi tentang aset lancar lebih baik adalah dengan menempel di papan-papan pengumuman dibalai desa. Jika hal ini dilakukan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang aset lancar.

Transparansi BPKAD Kota Metro kepada public tentang aset lancar disampaikan melalui website Kota metro dan surat kabar. Walaupun sudah diinformasikan melalui website dan surat kabar, tetapi belum memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tentang aset lancar dan baru sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Seharusnya selain website dan surat kabar, informasi tentang aset lancar juga harus dilakukan dengan menempel pada papan-papan pengumuman di setiap balai desa sehingga memudahkan masyarakat untuk melihat dan mengetahui tentang aset lancar.

Indikator Ekonomi

Total anggaran pada tahun 2015 adalah Total anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar 8.043.814.823,09 sedangkan realisasinya adalah sebesar 11.078.025.166,11 yaitu sebesar 137,72%. Total belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, total anggaran 22.897.669.981 atau sebesar 97,66% sehingga menghemat belanja operasi sebesar 2,34% dari anggaran. Total Belanja yang terdiri dari Belanja Modal, total anggaran adalah 4.557.662.000 sedangkan realisasinya adalah 4.407.643.000 atau sebesar 96,29% sehingga menghemat belanja modal 3,71% dari anggaran. Total belanja yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, total anggaran 28.024.636.519,62 sedangkan realisasinya adalah 27.305.312.981 atau sebesar 97,43% sehingga menghemat belanja 2,57% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan total pendapatan maka terjadi deficit sebesar (16.227.287.814,89) atau sebesar 81,21%.

Ekonomi dalam pengelolaan aset lancar dapat diartikan bahwa setiap pengeluaran yang berasal dari aset lancar, dikeluarkan dengan serendah mungkin sehingga pengeluaran dapat ditekan dan pada akhir tahun anggaran terdapat saldo yang merupakan sisa kegiatan operasional yang berada di kas yang menjadi kekayaan Kota Metro. Total anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar 8.043.814.823,09 sedangkan realisasinya adalah sebesar 11.078.025.166,11 yaitu sebesar 137,72%. Total belanja yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, total anggaran adalah 28.024.636.519,62 sedangkan realisasinya adalah 27.305.312.981 atau sebesar 97,43% sehingga menghemat belanja 2.57% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan total pendapatan maka terjadi deficit sebesar (16.227.287.814,89) atau sebesar 81.21%. Maka ini dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Metro belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga pendapatan daerah yang ke kas daerah belum terlalu tinggi.

Indikator Efisiensi

Efisiensi dinilai apakah penggunaan aset lancar telah digunakan untuk melakukan penilaian kinerja sebagaimana mestinya yaitu untuk mencukupi kebutuhan daerah atau belum. Kebutuhan daerah sendiri terdapat dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang disusun oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Di dalam DPA terdapat rencana anggaran SKPD selama satu tahun termasuk pengeluaran. Dengan efisiensi yang dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah kas yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan semua SKPD. BKAD selaku bendahara umum daerah maka mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan DPA yang terdapat di APBD. Pengeluaran tersebut sudah dianggarkan di APBD dan tidak boleh melebihi penerimaan daerah sehingga dengan uang yang dikelola di kas daerah dapat mencukupi kebutuhan semua SKPD. Karena pengeluaran yang dikeluarkan berdasarkan DPA maka kebutuhan masing-masing SKPD sudah terpenuhi karena pengeluaran tersebut sudah dianggarkan. Anggota Komisi II DPRD Kota Metro Bapak Amien Wahyudi mengatakan efisiensi sudah dilaksanakan di BPKAD Kota Metro, semua pengeluaran sudah digunakan sebagaimana mestinya. Tidak ada penyelewengan dalam pengeluaran daerah karena pengeluaran daerah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang sudah dianggarkan di APBD.

Efisiensi dilakukan melalui seleksi kegiatan mampu program sehingga dengan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya dapat mencukupi kegiatan pemda pada satu tahun. Efisiensi yang dilakukan oleh BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dilakukan sejak penyusunan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pada saat kepala SKPD mengajukan DPA yang berbasis program dan kegiatan selama satu tahun, BPKAD dari awal sudah melakukan penyeleksian apakah program-program maupun kegiatan tersebut benar-benar penting atau tidak hal ini bertujuan agar dengan pendapatan yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan daerah dan tidak terjadi pemborosan untuk membiayai program maupun kegiatan tersebut benar-benar penting atau tidak hal ini bertujuan agar dengan pendapatan yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan daerah dan tidak terjadi pemborosan untuk membiayai program maupun kegiatan yang tidak terlalu penting.

Indikator Efektivitas

Beban pengeluaran terlalu tinggi untuk belanja pegawai dan yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat hanya 25%. Fokus dari pemda selama ini hanya untuk belanja pegawai hal ini karena dalam DAU memang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sehingga prioritas utama dalam pengeluaran daerah adalah belanja pegawai. Maka untuk kebutuhan masyarakat adalah prioritas yang kedua setelah belanja pegawai. Dana yang diperuntukan bagi kegiatan masyarakat merupakan sisa dari pendapatan. Tujuan dalam pengelolaan aset lancar yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat masih belum mampu untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan semua belanja habis hanya untuk belanja pegawai. Dari sisi efektivitas dapat dikatakan bahwa BPKAD kurang efektif karena masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

BPKAD selaku dinas teknis kota Metro menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk efektivitas dapat dikatakan BPKAD belum efektif karena belum mampu memenuhi aspirasi public. Kas daerah sebagai bagian dari aset lancar yang bertugas untuk menerima dan mengeluarkan dana untuk kegiatan pemda pada kenyataannya pengeluaran lebih banyak dan diutamakan untuk belanja pegawai. Dengan pendapatan yang mini dan pengeluaran yang semakin banyak,

maka otomatis dana yang digunakan untuk masyarakat hanya kecil sehingga belum mampu memenuhi kepentingan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Aset lancar yang dikelola oleh BPKAD Kota Metro terdiri atas pengelolaan kas, piutang dan persediaan. Untuk persediaan, selama ini di Kota Metro belum ada mekanisme secara khusus mengatur tentang pengelolaan persediaan. Dari indikator penilaian kinerja yaitu akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi dan efektivitas perlu adanya pembenahan dari berbagai sisi seperti adanya transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban kinerja BPKAD dan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga pendapatan daerah yang masuk kas daerah menjadi meningkat. Perlu adanya peningkatan efisiensi juga sehingga dengan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya dapat mencukupi kegiatan pemda pada satu tahun.

BPKAD Kota Metro perlu lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD-SKPD dalam hal pengumpulan laporan keuangan setiap tahunnya. Koordinasi yang dilakukan dengan menetapkan batas waktu pengumpulan laporan keuangan yang disepakati bersama dari pihak BPKAD dengan masing-masing SKPD. BPKAD perlu melakukan pengawasan terhadap SKPD-SKPD yang memiliki piutang. Cara ini dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penyetoran piutang yang dimiliki oleh SKPD atau SKPD yang justru tidak melaporkan piutang yang dimilikinya ke BPKAD. Menggali potensi pajak daerah atau pendapatan asli daerah lainnya sehingga total pendapatan daerah akan naik dan menekan pengeluaran belanja baik belanja operasi maupun belanja modal supaya terjadi surplus dalam laporan anggaran dan realisasi pertahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Wuryan.2007. Akuntansi Sektor Publik Malang : Banyumedia

Bustian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar. Yogyakarta : Erlangga.

Darise,Nurlan.2008.PengelolaanKeuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Jakarta : PT Indeks.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua). Jakarta: Balai Pustaka.
- Handoko, Hani T. 1995. Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Hansen, Don. R & Mowen, Maryanne. M. 1997. Akuntansi Manajemen (edisi 4 Jilid2). Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akumicansi Kewangan Daerah (edisi revisi). Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul & Damayanti, Theresa. 2007. Pengeolaan Keuangan Daerah (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat). Jakarta:Gaung Persada Press.
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta :Gavamedia.
- Keown, Arthur J, et all. 2008. Manajemen Keuan angan Pemerintah Daerah: Panduq
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohammad. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta :BPFE
- Mardiasmo. 2004, Akuniansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Andi .2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta
- Andi Moleong, Lesy J 2000. Metode Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan (Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Mernjelang Perdagangan Bebas Dunia). Yogyakarta: BPFE
- Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Puda Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Ratminto & Winarsih, Septi Atik. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruky, Achmad S. 2002. Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) Panduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima). Jakarta: Gramedia.
- Sinambela, Poltak Lijan. 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan,dan implementasi. Jakarta:Bumi Aksara

- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan metode R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tangkilis an, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia
- Widodo, Joko. 2008. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Banyumedia
- Yuwono, Sony, dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah Malang: Bayumedia.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Ma, Jingxie. 2008. Discussion on the Quantification-Based Performance Evaluation of Rural County Government (International Journal of Business and Management). Volume 3 Nomor 8.
- MandyMok Kim Nan. 2009. The Relationship Between Distinctive Capabilities, Innovativeness, Strategy Types and The Performance of Small and Medium-Size Enterprises (SMEs) of Malaysian Manufacturing Sector (International Business and Economics Research Journal). Volume 8 nomor 11.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota Metro tahun 2012-2016.